

INTISARI

Dari hasil pemaparan sub-bab sebelumnya, Privatisasi BUMN sebenarnya bukan berasal dari fenomena parsial dari sebuah kondisi lokal dalam waktu tertentu, sebagaimana kasus yang pernah terjadi di Inggris pada tahun 1960-an atau 1970-an.

Privatisasi BUMN sesungguhnya merupakan salah satu program yang tercantum dalam agenda neoliberalisme sebagai kepentingan imperial neokolonialisme. Privatisasi BUMN tersebut merupakan program penting agar dapat menanamkan penjajahan terhadap negara berkembang dalam bentuk yang lebih baru, khususnya di Indonesia.

Privatisasi BUMN juga menimbulkan paradoks terhadap realitas perekonomian di Indonesia, namun slogan privatisasi sering diteriakkan oleh ahli ekonomi di Indonesia hingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat seiring dengan berbagai macam paradoks yang seharusnya dijawab oleh sebagian besar ahli ekonomi di Indonesia. Paradoks tersebut terwujud dalam bentuk korupsi di perusahaan nasional hingga hilangnya posisi tawar kepemilikan negara di setiap aset-aset kekayaan di Indonesia

Hal tersebut menjadi suatu sebab yang menjadikan aset-aset kekayaan nasional dimiliki oleh para pemilik modal swasta lokal maupun asing, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pergantian presiden RI yang sering dilakukan beberapa kali tidak mampu menjadi jawaban atas persoalan ekonomi rakyat yang ditimbulkan oleh program privatisasi BUMN itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kelonggaran kontrol negara terhadap infiltrasi kepentingan

imperial neo-kolonialisme di setiap kebijakan yang terwujud dalam bentuk rancangan perundang-undangan di Indonesia hingga sekarang-sekarang ini. Secara tidak langsung, negara menjadi 'komprador' atau pendukung kebijakan kapitalisme global yang secara hakiki merupakan penjajahan imperial neo-kolonialisme.